

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum Legal Theory dan Teori Peradilan Judicialprudence Termasuk Interpretasi Undang-Undang Legisprudence*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Yustisia, Cet.ke-1.
- Diana Halim Koentjoro, 2004, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia.
- Dominikus Rato, 2019, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta:Laksbang Pressindo.
- Dwiyanto Indiahono,2009, *Kebijakan Publik Berbasis Dinamic Policy Analysis*,Yogyakarta: Penerbit Gava Media
- Edi Suharto, 2007, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Bandung: Penerbit Alfabeta
- Endah Fujiastuti, 2008, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Semarang University Press
- F.X. Djumialdji,2005, *Perjanjian Kerja*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet.ke-1.
- Guntur Setiawan, 2004, *Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Hotma P. Sibuea, 2010, *Asas Negara Hukum,Peraturan Kebijakan & Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta: Erlangga.
- Imam Soepomo, 1983, *Hukum Perburuhan Bidang Pelaksanaan Hubungan Kerja*, Cet. V, Jakarta:Djambatan
- Indroharto, 1995, *Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata*, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Hukum Administrasi Negara, Bogor- Jakarta,
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodiks Sudrajat, 2019, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Publik*, Bandung:Nuansa Cendikia.
- Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, 1993, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Bandung Remaja Rosdakarya.
- L.J. van Apeldoorn, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Terjemahan, Diterjemahkan Oleh: Oetarid Sadino, Jakarta: Pradnya Paramitha.

- Maimun, 2003, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Marwan Mas, 1997, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Merile S. Grindle (Dalam Buku Budi Winarno). 2002, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Media Pressindo.
- Miftah Thoha. 2012. *Prilaku Organisasi Konsep Dasar dan Implikasinya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Erwin, 2012, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2020, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Purwanto dan Sulistyastuti, 1991, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Rochmat Soemitro, 2004, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Bandung: Refika Aditama.
- Said Zainal Abidin, 2004, *Kebijakan Publik*, Jakarta: Yayasan Pancur Siwa.
- Samun Ismaya, 2018, *Hukum ketenagakerjaan*, Ed-1 ,cet.ke-1. Yogyakarta : Suluh Media.
- Sendjun H. Manulang, 1995. *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Jakarta.
- Suratman, 2019, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia-Ed1*, cet 1, Depok : Rajawali Pers.
- Theo Huijbers, 1982, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius.
- Utrech, 1996, *Pengantar hukum administrasi negara*. Jakarta, Balai buku Ichtiar.
- Victor Situmorang, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara*, Bina Aksara, Jakarta.
- Yunuarsih dan Tjutju Suwanto, *Manajemen Sumber daya manusia Teori Aplikasi dan Isu Peneliti*.

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang “Ketenagakerjaan”  
Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial  
Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana  
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).  
Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja.  
Peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019  
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.  
Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional  
Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan Kesehatan masyarakat Corona Virus (Covid-19).  
Keputusan Menteri Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Kerja selama masa Pandemi Covid-19.

**Putusan Pengadilan:**

Putusan Pengadilan Nomor : 30/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Gsk

**Jurnal:**

Abdullah Ramdhani dan Muhammad Ali Ramdhani, 2017, *Jurnal Publik: Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*  
Agus Budi Setiyono, *Tesis Pembentukan Peraturan Hukum Daerah yang Demokratis oleh Pemerintah Daerah*,  
Ahmad Zaenal Fanani, *Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim*, Artikel ini pernah dimuat di *Varia Peradilan* No. 304  
Dian Herdiana, Idah Wahidah, Neni Nuraeni, Annisa Nur Salam, 2021, *Jurnal Inspirasi Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bagi Masyarakat Terdampak COVID-19 di Kabupaten Sumedang: Isu dan Tantangan*  
Mustakim dan Syafrida, 2020, *'Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure Dalam Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja di Indonesia'* SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i.  
Nur Agus Susanto, 2014, *Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012*, *Jurnal Yudisial* Vol. 7 No. 3

Saifudin, 2021, *Tesis Sistem Upah Perspektif Adil dan Ihsan (Studi Kasus PT.Sumber Alam Santoso Pratama Banyuwangi Pada Masa Pandemi Covid-19)*.

Tatiek Sri Djatmiati, 2004 “*Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia*”, Disertasi, Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya

Yusuf Randi, 2020 “*Pandemi corona sebagai alasan pemutusan hubungan kerja pekerja oleh perusahaan dikaitkan dengan Undang-undang ketenagakerjaan*”, Yurisprudensi jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

**Internet:**

dr. Rizal Fadli, 2020, ‘*Begini Kronologi Lengkap Virus Corona Masuk Indonesia*’ <https://www.halodoc.com/artikel/kronologi-lengkap-virus-corona-masuk-indonesia> .

DJPB Kemenkeu RI

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/kaltim/id/datapublikasi/pub/pengumuman/2908-kartu-prakerja.html>

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 <https://covid19.go.id/diakses> .

Moh. Mahfud MD, 2009, *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, “Mahkamah Konstitusi Jakarta. <http://repository.untagsby.ac.id/1154/2/BAB%20II>

**Kamus:**

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

**Lampiran:**

Putusan Pengadilan Nomor : 30/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Gsk